

**IMPLEMENTASI KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN
(KOSTRATANI) DI BPP KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**STRATEGIC COMMAND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (KOSTRATANI)
AT BPP PAYAKUMBUH SUB-DISTRICT
FIFTY CITIES DISTRICT**

Sidra Nefi¹, Gunarif Taib², Asmawi²

¹*Magister Prodi IPKP Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas*

²*Prodi IPKP Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas*

Penulis korespondensi : sidranefi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the implementation of the Kostratani program at BPP Payakumbuh District, Lima Puluh Kota District, to analyze the achievements of the implementation of the Kostratani program at BPP Payakumbuh District, Lima Puluh Kota District. This research is a qualitative research with the type of case study research, carried out from August to December 2022. The selection of locations and informants was carried out purposively (intentionally). Data analysis used descriptive qualitative analysis. From the research results it can be identified that the development of BPP Kostratani in BPP Payakumbuh District and the implementation of the functions and roles of BPP as a data center, center for the agricultural development movement, learning center are in accordance with the indicators in the Kostratani SOP. Meanwhile, BPP as an agribusiness consulting center and partnership network center has not been implemented according to the indicators in the Kostratani SOP. The implementation of Kostratani development at BPP Payakumbuh District has been supported by IPDMIP activities but has not yielded good results. BPP Payakumbuh Sub-District has only been able to implement four of the six BPP Kostratani indicators, the implementation of which has not been optimal because there is no commitment from implementers at the Kostrawil, Kostrada and Kostratani levels in the sub-district. The implementation of Kostratani has not been supported by resource capabilities in the form of human resources and facilities owned by BPP.

Keywords: Kostratani; BPP; Implementation.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menganalisis capaian pelaksanaan implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan Desember 2022. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara *purposive* (sengaja). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa pengembangan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dan pelaksanaan fungsi dan peran BPP sebagai pusat data, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran sudah sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Sedangkan BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraaan belum dilaksanakan sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Pelaksanaan pengembangan Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sudah di dukung oleh kegiatan IPDMIP tapi belum memberikan hasil yang baik. BPP Kecamatan Payakumbuh baru mampu melaksanakan empat dari enam indikator BPP Kostratani pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya komitmen dari implementor di tingkat Kostrawil, Kostrada dan Kostratani di kecamatan. Pelaksanaan Kostratani belum di dukung kemampuan sumberdaya berupa sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki oleh BPP.

Kata Kunci : Kostratani; BPP; Implementasi.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2011 dunia sedang mengalami perkembangan pesat dimana Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang dengan memanfaatkan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, dimana efisiensi mesin sudah terkoneksi dengan internet. Pada era ini dunia seolah tanpa batas wilayah karena sudah terkoneksi secara global. Revolusi Industri 4.0 menghasilkan banyak kreativitas dan kebaruan (Taib dan Roswita, 2019).

Pertanian 4.0 merupakan spesialisasi Revolusi Industri 4.0 di bidang pertanian. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan pertanian di era 4.0, Menteri Pertanian menggagas program gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). Menurut Permentan No. 49 Tahun 2019 Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian di kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Tujuan Kostratani adalah mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam jangka pendek, tujuan pelaksanaan Kostratani adalah meningkatkan penguatan sarana dan prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan.

Kostratani merupakan sebuah program aksi Kementerian Pertanian dan program utama BPPSDMP Kementerian Pertanian yang dimaksudkan sebagai gerakan satu komando dari pusat sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian yang melibatkan eselon 1 lingkup kementerian pertanian dan kementerian/lembaga lainnya. Sebagai pelaksana Kostratani adalah BPP yang memiliki lima peran sebagai 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang terkoneksi ke *Agricultural War Room (AWR)* di Kostratanas; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian; 3) Pusat pembelajaran merupakan wadah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapang/Demplot /Demfarm

/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis merupakan tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan. Pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya tersebut sudah diatur dengan dikeluarkannya Permentan No. 49 Tahun 2019 kemudian diterbitkannya Juklak, Juknis dan SOP yang lengkap sebagai panduan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Kostratani oleh Kementerian Pertanian dimulai sejak tahun 2019 dengan penumbuhan sebanyak 400 BPP Kostratani di 100 kabupaten dan kota di 13 provinsi di Indonesia (BPPSDMP, 2020) Pada tahun 2020 ditargetkan ada penambahan 3.046 BPP Kostratani lagi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022 ditargetkan 5.733 BPP di Indonesia sudah menjadi BPP Kostratani (BPPSDMP, 2022).

Hasil Penelitian dari Izmi (2021) menyebutkan program tersebut telah berjalan dengan baik dan tepat keberadaannya di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dari tahun 2020 setidaknya sudah berjalan 25%. Akan tetapi belum didukung dengan kemampuan sumber daya yang lengkap. Penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2021) menyimpulkan bahwa peran BPP sebagai pusat data dan informasi dalam mendukung program Kostratani termasuk tinggi yang dipengaruhi oleh peran penyuluhnya, keberadaan tenaga IT dan partisipasi dari petani. Dari penelitian diatas dapat diketahui di beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya dan banyak faktor yang mendukung pelaksanaan Kostratani tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk melihat implementasi atau pelaksanaan dari program Kostratani di BPP Kostratani di Sumatera Barat dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun yaitu Permentan Nomor 49 tahun 2019, Juklak, Juknis dan SOP Kostratani.

Di Provinsi Sumatera Barat, program Kostratani mulai dilaksanakan sejak tahun 2020. Keterbatasan anggaran dari kementerian sejak Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak semua BPP di Sumatera Barat memperoleh dana dukungan untuk pengembangan Kostratani. Saat ini melalui kegiatan IPDMIP dan DAK Pertanian baru 36 BPP yang terfasilitasi, terdiri dari ; 7 BPP di Kab. Pesisir Selatan, 9 BPP di Kab. Pasaman, 6 BPP di Kab. Pasaman Barat, 7 BPP di Kab. Lima Puluh Kota dan 7 BPP di Kab. Sijunjung dan 1 di Kab. Darmasraya (Wawancara dengan KJF Dinas Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Bapak Ilham, 5 September 2022)

Salah satu Kabupaten yang cukup cepat merespon program Kostratani di daerahnya adalah

Kabupaten Lima puluh Kota. Penanggung jawab Kostratani di daerah tersebut adalah BPTUHPT Padang Mengatas. Respon cepat dari pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan menjadikan seluruh BPP kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai BPP Kostratani dengan diterbitkannya SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300 tahun 2020 “Tentang pembentukan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (Kostrada) dan Komando Strategis Pertanian (Kostratani) Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Sejak digulirkannya program Kostratani pada tahun 2019 hingga penelitian ini dilaksanakan belum diketahui sejauh mana perkembangan kegiatan BPP Kostratani yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya adalah BPP Kecamatan Payakumbuh. Sehingga dari beberapa latar belakang tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk menganalisis capaian pelaksanaan implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan dan menguraikan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami proses atau interaksi sosial. Moleong (2017) mendefinisikan penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan tujuan penelitian, orang-orang yang dijadikan informan adalah Koordinator BPP Kecamatan Payakumbuh, seluruh Penyuluh Pertanian dan tenaga fungsional yang terkait

kegiatan Kostratani yang berada di BPP Kecamatan Payakumbuh pihak instansi terkait yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota yang dalam hal ini adalah Kepala Bidang Penyuluhan dan Kasie Penyuluhan yang menangani urusan penyuluhan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Camat Kecamatan Payakumbuh selaku Ketua Kostratani dan anggota Gapoktan/kelompok tani.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sesuai dengan desain penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian maka Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang sudah ditargetkan atau diharapkan terjadi, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standar yang telah digunakan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh

Implementasi program Kostratani di BPP Kostratani yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan lima peran BPP Kostratani berdasarkan Juknis dan SOP BPP Kostratani yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian tahun 2020. SOP ini digunakan sebagai pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dalam menyamakan gerak serta mendorong dan mengimplementasikan peran dan fungsi BPP Kostratani. Juknis dan SOP BPP Kostratani memberikan petunjuk kongkrit dalam pelaksanaan kegiatan di BPP untuk mencapai tugas, fungsi dan peran BPP yang maksimal. Adapun peran dan fungsi BPP Kostratani berdasarkan Juknis dan SOP BPP Kostratani yang dilaksanakan oleh BPP Kecamatan payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BPP Sebagai Pusat Data dan Informasi

Implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sebagai Pusat Data dan Informasi berdasarkan SOP, dapat dideskripsikan secara umum bahwa kegiatan di BPP Kecamatan Payakumbuh sudah dilaksanakan namun data dan informasi yang tersaji hanya berupa data yang wajib di input melalui aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari koordinator dan penyuluh BPP Kecamatan Payakumbuh Data yang diinputkan hanya dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Sedangkan data peternakan masih kosong karena tidak adanya informasi yang diperoleh dari penyuluh peternakan yang bertugas di wilayah Kecamatan Payakumbuh. Kekosongan

tersebut berlangsung sejak dimulainya aplikasi pelaporan utama hingga penelitian ini dilakukan.

Kondisi ini karena OPD di bidang pertanian dan peternakan terpisah dan tidak adanya komunikasi dan koordinasi dalam pengumpulan data. Kondisi tersebut terus berlanjut karena tidak adanya monev tentang pelaporan data tersebut baik dari tingkat kabupaten (Kostrada), tingkat provinsi (Kostrawil) hingga tingkat pusat. Sejak bulan Januari 2022 hingga penelitian ini dilakukan, pengisian data di aplikasi laporan utama tidak dilaksanakan oleh petugas admin dan tidak ada permasalahan.

Saat ini Informasi pendukung yang berhubungan dengan kebutuhan petani seperti data dan informasi pembiayaan, sumber bibit/benih, data ketersediaan saprodi pertanian, data pelaku usaha pertanian dan data pendukung usaha tani lainnya belum tersedia dan belum terdokumentasi dengan baik di BPP. Walaupun informasi tersebut masih dapat diperoleh oleh petani dari penyuluh di BPP tetapi belum *realtime*. Sehingga kebutuhan petani terhadap data dan informasi untuk keperluan usaha taninya belum terakomodir dengan baik.

2. BPP Sebagai Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian

Implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dalam pelaksanaan BPP Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian untuk mensinergikan semua kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP berdasarkan SOPnya sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di BPP Kecamatan Payakumbuh prosedur yang dilaksanakan dalam mendukung program pembangunan pertanian sudah dilakukan di BPP sebelum diberlakukannya BPP Kostratani. Perbedaan mendasar dalam proses CP/CL adalah datanya lebih update dan lebih valid karena sudah disinkronkan dengan data simluhan. Sehingga data CP/CL lebih tetap sasaran sehingga sangat membantu dalam proses pengawalan dan pendampingan kegiatan oleh BPP dan penyuluh di lapangan. Namun peran BPP sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh BPP baru pada sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk program peternakan, ditangani langsung oleh dinas yang bersangkutan.

3. BPP Sebagai Pusat Pembelajaran

Implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sebagai Pusat Pembelajaran, semua langkah kerja menurut SOPnya sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dari informan pelaksanaan proses pembelajaran di wilayah kerja BPP Kecamatan Payakumbuh sudah dilaksanakan sebelum

dicanangkannya Kostratani. Namun pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada ada tidaknya pendanaan. Karena semua jenis metode pembelajaran seperti SL, demplot, maupun kursus tani membutuhkan biaya untuk menyediakan alat dan bahan pembelajaran.

Dengan adanya program Kostratani, volume kegiatan pembelajaran di BPP Kecamatan Payakumbuh lebih meningkat dan sudah memanfaatkan IT. Pelaksanaan pelatihan petani ataupun petugas yang difasilitasi Kementerian Pertanian dilakukan secara online melalui teleconference atau zoommeeting. Beberapa pelatihan diantaranya pelatihan TOT bagi petugas dan pelatihan 1 juta petani yang dilaksanakan oleh BPP dengan memanfaatkan proyektor infocus.

Sebagai BPP Kostratani, BPP Kecamatan Payakumbuh menerima kegiatan pemberdayaan petani yang dibiayai melalui program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP). IPDMIP memberikan pembiayaan terhadap terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi yang berkelanjutan. Dengan IPDMIP pemberdayaan petani dilakukan melalui penguatan penyuluh pertanian dengan sasaran kegiatan adalah kelompok tani, BPP dan penyuluh pendamping. Dalam pelaksanaannya proses pembelajaran disampaikan oleh penyuluh kepada petani melalui Sekolah Lapangan dan berbagai metode penyuluhan lainnya, diantaranya demonstrasi alat, penyuluhan antar desa, pertemuan bulanan, pelatihan dan lainnya.

Sesuai dengan tujuan kegiatannya, IPDMIP khusus di laksanakan di daerah irigasi. Di wilayah kerja BPP Kecamatan Payakumbuh penerima kegiatan IPDMIP hanya di tiga WKPP yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Sungai Beringin dan Nagari Piobang dengan penyuluh pendamping dari penyuluh setempat, tetapi dalam pelaksanaannya Koordinator BPP Kecamatan Payakumbuh melibatkan seluruh penyuluh di BPP untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran melalui SL kepada petani. Selain itu dengan adanya kegiatan IPDMIP juga mendorong dilakukannya replikasi kegiatan pembelajaran berupa SL di WKPP non IPDMIP oleh penyuluh melalui dana APB Nagari.

Program IPDMIP merupakan sebuah program pembangunan yang terintegrasi dengan melibatkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementan dan Bappenas. Sinergi dan hubungan tata kerjanya sangat baik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Melibatkan seluruh stake holder terkait sampai kepada Camat

dan BPP. Namun sinergitas dan hubungan tata kerja yang baik ini tidak mampu menggambarkan tentang keberadaan BPP Kostratani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Payakumbuh, Camat tidak mengetahui tentang Kostratani namun sangat paham tentang IPDMIP dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh penyuluh di lapangan, hal ini menurut beliau disebabkan karena kurangnya interaksi dan komunikasi antara pihak yang terlibat dalam program tersebut. Menurut beliau hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 di awal pembentukan Kostratani berlanjut dengan terjadinya perubahan struktur dan nomenklatur OPD serta terjadinya mutasi pejabat seiring dengan pergantian kepala daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya komitmen para pelaku kebijakan sebagai pelaksana Kostratani.

Dengan adanya kegiatan IPDMIP, Peran BPP sebagai pusat pembelajaran memang lebih baik dan dirasakan langsung oleh petani. Demikian juga halnya dengan adanya peningkatan fasilitas yang dimanfaatkan oleh BPP seperti komputer, PUTS dan PUTK. Namun tidak semua petani mendapatkan manfaatnya karena pembiayaan untuk proses pembelajaran hanya di peruntukkan pada daerah beririgasi saja.

4. BPP Sebagai Pusat Konsultasi Agribisnis

Implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sebagai Pusat Konsultasi Agribisnis berdasarkan SOP diketahui secara umum belum dilaksanakan sesuai petunjuk dalam SOPnya. Akan tetapi keberadaan BPP saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh petani. Hal ini juga diakui oleh Ketua Gapoktan Sumua Onggang bahwa layanan konsultasi petani ke BPP sudah dimanfaatkan oleh petani. Perubahan yang terjadi saat ini adalah petani sudah lebih banyak yang melakukan kunjungan ke BPP, mereka tidak lagi takut atau malu untuk menemui penyuluh di BPP.

Layanan konsultasi kepada petani dapat dilakukan oleh setiap penyuluh yang berada di BPP saat petani datang berkonsultasi. Dalam memberikan layanan dan rekomendasi, penyuluh di BPP Kecamatan Payakumbuh sudah memanfaatkan teknologi informasi sehingga informasi yang diberikan lebih *up to date*.

Dengan perubahan BPP Kecamatan Payakumbuh menjadi BPP Kostratani, seharusnya pelayanan konsultasi petani akan lebih optimal dengan melibatkan petugas teknis lain yang kompeten. Syahyuti (2021) telah mengklasifikasikan peran dan aktor yang terlibat di dalam BPP Kostratani. Untuk peran sebagai pusat konsultasi agribisnis aktor yang terlibat adalah Koordinator PPL, PPL pemerintah, PPL swadaya,

PPL swasta (Perusahaan, perguruan tinggi, dll), Puskesmas, POPT (hama penyakit tanaman), Pengawas benih, bibit ternak, mutu pakan, Medik veteriner, inseminator, BPTP. Tetapi di BPP Kecamatan Payakumbuh, konsultasi hanya dilayani oleh petugas penyuluh pertanian yang ada di BPP. Keterlibatan aktor lain tidak ada karena aktor-aktor tersebut berada di dinas atau wilayah kerja masing-masing dan tidak berkantor di BPP Kecamatan Payakumbuh. Ketika petani ingin mendapatkan layanan di bidang lain di luar bidang pertanian, hortikultura dan perkebunan maka petani mencari sendiri petugas teknisnya atau di bantu oleh penyuluh pertanian untuk menghubungi aktor petugas tersebut.

Dalam hal monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin tidak ada dilakukan meskipun dalam SOPnya harus dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak ada penegasan maupun monitoring dan evaluasi dari penanggung jawab kegiatan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Evaluasi untuk BPP hanya dilakukan ketika ada kegiatan penilaian BPP berprestasi.

5. BPP Sebagai Pusat Jejaring Kemitraan

Implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sebagai Pusat Jejaring Kemitraan berdasarkan SOP dapat diketahui bahwa belum dilaksanakan sesuai SOPnya. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan mitra relatif lemah sehingga informasi yang diperoleh pun terbatas. Keterbatasan informasi dan minimnya dukungan sarana dan prasarana dan tidak adanya pembiayaan dalam penyelenggaraan operasional di BPP terutama untuk melaksanakan kegiatan seperti mengadakan pertemuan dengan pelaku utama, temu usaha dan lain-lain, masih kurangnya kompetensi SDM penyuluh dalam manajerial usaha tani serta kurangnya dukungan dari pelaku utama dan pelaku usaha menyebabkan peran BPP tidak terlaksana.

Dengan adanya IPDMIP pengetahuan petugas tentang manajemen usaha menjadi lebih baik karena adanya pelatihan yang dikhususkan bagi pendamping program IPDMIP sehingga kemampuan petugas tidak merata. Dari wawancara dengan penyuluh di BPP Kecamatan Payakumbuh disampaikan bahwa ada atau tidak adanya program Kostratani belum dirasakan dampaknya bagi BPP.

B. Capaian Implementasi Program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh

Menurut Marille S. Grindle dalam Subarsono (2022) keberhasilan suatu implementasi dapat diukur. Adapun keberhasilan dan kegagalan implementasi dilihat dari hasil (outcomes) implementasi program khusus, berdasarkan ukuran bersifat parsial dari keberhasilan atau kegagalan

implementasi kebijakan secara menyeluruh (Ekowati, 2009). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan beberapa aspek yang dianalisis menurut teori Grindle dalam proses implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh meliputi, jenis manfaat yang diterima, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, sumber daya yang digunakan, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap terhadap program Kostratani.

1. Tipe Manfaat

Salah satu variabel dalam mengukur keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle adalah tipe manfaat atau jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran (*target groups*). Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh di BPP Kecamatan Payakumbuh jenis manfaat yang dirasakan adalah petugas penyuluh pertanian lebih fasih dalam penggunaan IT, dan lebih melek data karena adanya kewajiban untuk melakukan updating data pertanian setiap waktu. Manfaat lain yang dirasakan adalah adanya peningkatan perhatian dari pemerintah pusat terkait penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran penyelenggaraan penyuluhan di BPP walaupun fasilitas tersebut belum terdistribusi secara baik. Seperti adanya fasilitas TV layar datar 34 inchi yang seharusnya dimanfaatkan untuk zoom meeting dan terhubung dengan AWR pusat, tidak didistribusikan oleh pihak dinas ke BPP karena alasan tertentu. Banyaknya pelatihan online maupun offline untuk peningkatan SDM petugas terutama berkaitan dengan kegiatan IPDMIP namun belum merata untuk semua penyuluh karena fokus pada penyuluh pendamping atau petugas admin. Adanya fasilitas toolkit dan internet menggunakan modem dan paket data yang bersumber dari anggaran DAK non fisik di BPP yang digunakan untuk sarana penyuluhan.

Manfaat yang dapat dirasakan bagi petani diantaranya adalah mereka mengenal teknologi maju untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi usaha taninya, meskipun tidak semua teknologi dapat di terapkan di setiap wilayah. Petani juga memperoleh insentif berupa subsidi pupuk dan bantuan benih. Selain itu juga terjadi peningkatan produksi dengan diterapkannya teknologi yang digunakan. Selain itu petani lebih sering melakukan konsultasi ke BPP terkait kegiatan usaha taninya maupun untuk mencari informasi tentang program pemerintah. Bantuan yang di berikan pemerintah cukup membantu petani meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan petani.

2. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Salah satu tolak ukur dalam pencapaian implementasi program Kostratani adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan.

Untuk membedakan BPP lama dengan model BPP Kostratani ada beberapa indikatornya (Sri Mulyani, 2020). Indikator Model BPP Kostratani diantaranya sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan Informasi Pertanian. Kostratani Sebagai Pusat Data dan Informasi harus mempunyai Data Petani, Data Kelembagaan Pelaku Utama (poktan, gapoktan, KEP), Data Kelembagaan Penyuluhan (BPP dan Posluhdes), Data Ketenagaan Penyuluhan (PNS, THLTBPP, Swadaya, & Swasta) dan Materi & Informasi Penyuluhan. Namun demikian karena Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian maka perlu dikuatkan dengan data Data Areal Tanam (TP, HORT, BUN), Data Populasi dan Produksi (PKH), Data Komoditas Ekspor (Barantan), Harga Komoditas (BKP) maupun SDM, potensi wilayah, data standing crop, serta data statistik Pertanian lainnya. Dalam pelaksanaan perannya sebagai pusat data dan informasi, di BPP Kecamatan Payakumbuh memiliki semua data seperti data petani, kelembagaan petani, data kelembagaan pelaku utama, data kelembagaan penyuluhan, data ketenagaan penyuluhan, data statistik pertanian yang mencakup luas tanam dan produksinya (TP, HORT, BUN), data standing crop. Tetapi data-data tersebut sebagian belum berupa Hardcopy, sehingga ketika data tersebut dibutuhkan harus menunggu petugas admin untuk membuka aplikasi pelaporannya. Pemanfaatan Cyber Extension untuk penyebaran materi dan informasi belum dilakukan oleh semua penyuluh di BPP.
- b. Terlaksananya Program Utama Kementerian Pertanian (Propaktani, Gedor Horti, Grasida, Sikomandan, Gratieks, PMS, KUR Inovasi, Petani Milenial, dll. Perlunya pendampingan Program Utama Kementan kepada petani secara langsung, diantaranya: penyusunan eRDKK, CPCL, memverifikasi CPCL; mengawal Ketersediaan Benih, Pupuk, Alsintan, Teknologi, Pembiayaan, Pangan, Informasi Harga; Percepatan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Di WKPP. Keterlibatan BPP Kecamatan Payakumbuh dalam kegiatan utama Kementrian Pertanian terlihat pada pelaksanaan pendampingan penyusunan eRDKK, CPCL, memverifikasi CPCL; mengawal Ketersediaan Benih, Pupuk, Alsintan, Teknologi, Pembiayaan, Pangan, Percepatan Pelaksanaan Program

- Dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Di WKPP. Pelaksanaannya melibatkan seluruh penyuluh Pertanian di WKPP. Saat ini di Wilayah kerja BPP Kecamatan Payakumbuh ada kegiatan dari kementerian pertanian yang bertujuan untuk penguatan BPP, petani dan penyuluh yaitu IPDMIP yang berada di 3 Nagari. Dan ada juga kegiatan penguatan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan yaitu kegiatan Renovasi dan Pembangunan RMU di Gapoktan.
- c. Terkoneksi dengan Agriculture War Room (AWR), jika sudah terkoneksi maka BPP menjadi BPP Kostratani. Artinya laporan dari BPP Kostratani langsung terhubung dengan AWR Kementan. Berarti BPP harus melaporkan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh kementan. Disaat yang sama BPP Kostratani terhubung dengan AWR Kementan Melalui program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh badan SDM, seperti MSPP, NGOBRAS, Bertani on Cloud. Kostratani yang sudah melakukan transformasi menjadi BPP Kostratani berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Saat ini BPP Kecamatan Payakumbuh sudah terhubung dengan AWR Kementerian Pertanian dengan melaporkan data melalui aplikasi Simluhtan, Pelaporan Utama Kostratani, e-RDKK, statistik tanaman pangan melalui aplikasi SIPDP dan e-Reporting untuk luas lahan kelompok tani. Tetapi data yang berhubungan dengan bidang peternakan belum dimasukkan dalam aplikasi pelaporan utama.
 - d. Terdapat fasilitas belajar (demplot/SL). Fasilitas belajar berupa demplot/SL dapat dilakukan di lahan BPP, dan atau di lahan pelaku utama atau pelaku usaha oleh Penyuluh Pertanian secara perorangan atau tim Penyuluh Pertanian melalui kegiatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan kegiatan APBD. BPP Kecamatan Payakumbuh sudah memiliki lahan demplot sendiri seluas $\pm 0,5$ Ha yang dimanfaatkan sebagai tempat kaji terap teknologi sesuai komoditas unggulan di wilayahnya. Selain itu BPP Kecamatan Payakumbuh juga pelaksana kegiatan IPDMIP sebagai dukungan pengembangan BPP Kostratani dari Kementerian Pertanian. Dari kegiatan IPDMIP, BPP Kecamatan Payakumbuh mendapatkan fasilitas IT untuk menunjang perannya sebagai pusat data dan informasi dan melaksanakan SL dan demplot penerapan teknologi di 3 Nagari sebagai pusat pembelajarannya. Terdapat informasi/cara akses modal, pasar dll.
 - e. Tersedianya cara akses modal baik melalui perusahaan atau lembaga keuangan pemerintah atau swasta untuk pembiayaan dan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan usahatani. Untuk indikator ini di BPP Kecamatan Payakumbuh belum tersedia informasi dan cara akses modal untuk pembiayaan yang di butuhkan oleh pelaku utama.
 - f. Terdapat mitra. Kostratani harus menjadi fasilitator dalam mengidentifikasi pola kemitraan yang harus dibangun oleh pelaku utama dan pelaku usaha yang saling menguntungkan. Kemitraan tersebut dalam rangka mempermudah akses dari berbagai sektor yang akan mendukung pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja Kostratani. Komoditas yang dimitrakan sesuai dengan komoditas unggulan diantaranya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan. Komoditas yang dimitrakan berupa produk segar maupun olahan yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja Kostratani. Untuk indikator ini di BPP Kecamatan Payakumbuh juga sudah dilakukan identifikasi pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja BPP tapi belum berupa data kongkrit. metode yang digunakan BPP melalui penyuluh untuk menghubungkan petani dengan mitra hanya melalui informasi lisan belum berupa kegiatan temu usaha yang mengumpulkan petani dan mitra di BPP.
- Berdasarkan indentifikasi dari 6 indikator BPP Kostratani, BPP Kecamatan Payakumbuh sudah melaksanakan 4 indikator namun penerapannya belum optimal. Seperti data komoditas yang tidak lengkap, pemanfaatan Cyber Extention belum dilakukan, dan belum data informasi akses modal/pasar serta pola kemitraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Melihat pelaksanaan indikatornya BPP Kecamatan Payakumbuh sudah melaksanakan peran sebagai BPP Kostratani tetapi belum maksimal.
- Pengembangan program Kostratani dan pembangunan SDM pertanian oleh Kementerian pertanian dilakukan dengan strategi berupa (a) Peningkatan peran pemimpin Daerah (Kepala desa, Camat, Bupati, dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam pembangunan

pertanian. (b) Peningkatan sinergitas pelaku dan program. (c) Peningkatan jejaring kerja Kostratani dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah. (d) peningkatan peran pemimpin non formal kemasyarakatan dalam pembangunan pertanian.

Namun kenyataannya strategi yang telah direncanakan dari pemerintah pusat belum dilaksanakan di BPP Kecamatan Payakumbuh bahkan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara luas. Dari Wawancara dengan Camat Kecamatan Payakumbuh yang menjabat saat ini di kantor camat Kecamatan Payakumbuh bahkan mengatakan bahwa beliau tidak tahu dan belum paham tentang program Kostratani meskipun secara aksi beliau selalu mengikuti kegiatan di tingkat kelompok tani dalam hal pembelajaran maupun fasilitasi program pertanian kepada petani. Beliau juga mengungkapkan bahwa belum pernah melakukan koordinasi dengan BPP terkait program Kostratani.

Bahkan Camat dan Kepala Bidang Penyuluhan yang menjabat saat ini tidak mengetahui adanya SK pembentukan Kostratani di tingkat kota hingga kecamatan. Pejabat yang bertanggung jawab atas program ini adalah pejabat baru yang tidak mengikuti proses pembentukan BPP Kostratani. Kepala Bidang Penyuluhan dan Camat Kecamatan Payakumbuh mengungkapkan bahwa mereka sama sekali belum pernah melihat peraturan/kebijakan tentang Kostratani baik Permentan No 49 maupun Juknisnya. Sehingga mereka juga tidak mengetahui tentang perannya sebagai Kostrada dan Kostratani.

Diakui juga oleh kepala bidang bahwa perlunya dinas sebagai pelaksana di tingkat daerah sebagai Kostrada melakukan komunikasi dan koordinasi kembali dengan seluruh pihak yang terlibat dalam program Kostratani.

Demikian pula dengan peran para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan BPP Kostratani tidak terlihat. Di BPP Kecamatan Payakumbuh semua kegiatan dijalankan sepenuhnya oleh penyuluh pertanian. Pasca pembubaran lembaga penyuluhan BP3K dan BP4K, penyuluh dan petugas teknis terpisah karena kembali ke dinas masing-masing sehingga BPP tidak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya penyuluh dan petugas teknis lainnya yang berakibat pada sulitnya komunikasi dan koordinasi antar petugas. Selain itu informasi tentang program pertanian dari Kementerian Pertanian menjadi terkotak kotak dan sering terputus di tingkat dinas masing-masing sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi terhambat.

Informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Koordinator BPP Kecamatan Payakumbuh dan penyuluh pertanian di BPP tersebut, program Kostratani baru digulirkan pada

tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Implementasi yang sedang dilaksanakan adalah terkait data, sebelum adanya program Kostratani, data tidak di update setiap hari sedangkan saat ini Kementerian ingin dengan adanya Kostratani dapat memperoleh data yang lengkap dan terakses di Pusat setiap hari, kementerian mengetahui kondisi dan pengembangan komoditas pertanian melalui pelaporan utama perminggunya. Sedangkan untuk pupuk, Kementrian terdapat 2 (dua) aplikasi pelaporan yaitu e-alokasi pupuk bersubsidi dan e-Verval. Aplikasi ini untuk pendampingan dan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi.

Selain perubahan diatas, terkait peran BPP sebagai pusat pembelajaran dan pusat konsultasi agribisnis telah dijalankan sejak sebelum adanya program Kostratani tersebut. Meskipun dalam proses pelaksanaannya sangat bergantung pada anggaran dan fasilitas yang ada di BPP. Menurut petugas BPP lainnya, program Kostratani dalam peran sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian masih belum dirasakan signifikan oleh para petani. Terkait dengan tujuan program untuk peningkatan produksi, dengan penggunaan teknologi dan stimulan bantuan benih unggul diakui memang mampu mendorong peningkatan produksi padi di kelompok tani.

Sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan, BPP Payakumbuh belum mampu membangun kerjasama dan kemitraan usaha antar pelaku utama dan pelaku usaha. BPP belum menginventarisasi perusahaan mitra dan belum mampu memfasilitasi temu usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha karena tidak memiliki anggaran untuk mengadakan pertemuan.

3. Letak Pengambilan Keputusan

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2022) letak pengambilan keputusan akan menjelaskan apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dibuat tentu karena adanya latar belakang yang mendorongnya. Dalam melaksanakan kebijakan, keberhasilannya harus didukung oleh seluruh stakeholder. Koordinator BPP Payakumbuh berpendapat, bahwa keberadaan kebijakan terkait Program Kostratani sudah tepat berada di Balai Penyuluhan Pertanian, karena susunan kebijakan yang diperlukan dalam melakukan pembangunan pertanian juga tepat sasaran. Menurut penyuluh di BPP Kecamatan Payakumbuh, adanya Program Kostratani adalah suatu inovasi yang baik. Akan tetapi, hal tersebut masih dibarengi dengan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah menggaungkan Program Kostratani dengan segala aturan dan mekanisme yang ada. Bahkan dengan diterbitkannya SK pembentukan Kostratani di tingkat kecamatan oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 tidak membawa perubahan dalam pelaksanaan peran BPP. Hingga saat ini, fasilitas pendukung atau sarana prasarana program belum memadai.

Jika dilihat dari sisi petani, para petani masih belum paham dengan Program Kostratani dan terhambat penginformasiannya karena Pandemi Covid-19 dan tidak adanya komitmen dari pemerintah pusat untuk menjalankan program tersebut membuat program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh jalan di tempat. Meskipun demikian, para petani tetap melakukan konsultasi pertanian ke BPP yang merupakan salah satu tujuan dari program Kostratani.

4. Sumberdaya Yang Digunakan

Menurut Grindle (1980) dalam Subarsono (2022) keberhasilan implementasi sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sumberdaya yang dilibatkan dalam implementasi program ini meliputi sumberdaya manusia (human resources) dan sumberdaya bukan manusia (non-human resources) yang meliputi sumberdaya anggaran/dana dan sumber daya fasilitas. Semakin memadai sumberdaya yang tersedia, maka akan semakin mudah implementasi program dilaksanakan (Alfia, 2016).

Menurut penyuluh pertanian dan Koordinator BPP Kecamatan Payakumbuh, dalam ketersediaan sumberdaya manusia BPP masih kekurangan anggota/staf untuk melakukan kegiatan administrasi sehingga penyuluh di BPP Kecamatan Payakumbuh memiliki tugas rangkap dalam kegiatan input data dan tugas-tugas lainnya. Hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dalam melakukan pembinaan ke lapangan. Pekerjaan rangkap untuk administrasi cukup menyita waktu penyuluh sehingga berakibat kurangnya waktu kunjungan ke kelompok tani.

Namun begitu, walaupun ada kekurangan SDM secara kuantitas tetapi secara kualitas tetap dapat membuat kegiatan menjadi terlaksana dengan baik. Untuk sumberdaya fasilitas yang seharusnya menunjang kegiatan program ini ialah pengadaan bantuan prasarana oleh pemerintah pusat berupa komputer, LCD, jaringan internet/modem, sound sistem, kamera webcam, dan perangkat PUTS dan PUTK. Fasilitas yang diberikan dari pemerintah pusat saat ini belum mampu menunjang kegiatan operasional di BPP karena fasilitas yang ada di BPP Kecamatan Payakumbuh sebelum adanya bantuan pusat merupakan fasilitas lama yang sudah rusak. Bahkan printer harus mereka beli

secara swadaya. Begitu juga halnya dengan bantuan modem tidak serta merta dapat mengatasi masalah jaringan internet di BPP. Penyuluh masih mengandalkan fasilitas teathering pribadi untuk menyelesaikan laporan dan penginputan data ke aplikasi. Khusus di BPP Payakumbuh, LCD dari pusat tidak disalurkan oleh pihak dinas dengan alasan tertentu sehingga tujuan pengadaannya tidak tercapai.

Untuk pelaksanaan pelatihan/telekonferensi/zoommeeting terpaksa masih menggunakan laptop dan layar proyektor seadanya.

Untuk sumber daya anggaran, BPP Kecamatan Payakumbuh sebagai BPP Kostratani tidak memiliki anggaran sendiri. Penyelenggaran penyuluhan hanya mengandalkan anggaran DAK non fisik dan pembiayaan dari kegiatan IPDMIP yang sepenuhnya dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut dipertegas oleh Kasie Penyuluhan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bahwa untuk penyelenggaraan BPP tidak ada dalam mata anggaran di dinas tapi hanya dari anggaran DAK non fisik untuk fasilitas pulsa internet dan pelatihan tematik bagi petani di BPP. Bahkan untuk pengelolaan lahan demplot di BPP dibiayai secara pribadi penyuluh di BPP Kecamatan Payakumbuh. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, ketiadaan anggaran di BPP dapat memperlambat proses penyelenggaraan penyuluhan.

5. Tingkat Kepatuhan Dan Daya Tanggap (Responsifitas) Kelompok Sasaran

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Pada dasarnya sebaik apapun implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan akan menjadi tidak berarti jika tidak ada kepatuhan dari kelompok sasaran. Disini tugas dari implementor untuk memiliki daya tanggap untuk dapat menangkap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapat dukungan dari kelompok sasaran. Semakin patuh dan semakin tinggi daya tanggap baik dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran, maka akan semakin mudah suatu kebijakan untuk diimplementasikan.

Saat diluncurkannya Program Kostratani dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya, tanggapan dari kelompok sasaran yaitu BPP, petugas penyuluh pertanian dan petani cukup baik. BPP Kecamatan Payakumbuh sebagai pelaksana maupun kelompok tani sasaran juga mematuhi segala aturan terkait program. Di awal, pemerintah pusat menggaungkan program

Kostratani dengan kuat namun dalam perjalanannya komitmen untuk menjalankan program makin berkurang. Segala sesuatu yang direncanakan baik anggaran, monitoring dan pelaporannya semakin lemah. Sehingga saat ini program Kostratani jalan di tempat dan transformasi BPP menjadi BPP Kostratani dengan menjalankan lima perannya berjalan sendiri-sendiri. Kegiatan hanya fokus untuk menjalankan program-program strategis dari pusat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya bentuk kepedulian dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi sebagai Kostrawil dan tingkat Kabupaten sebagai Kostrada dalam hal pendampingan dan dukungan dalam mewujudkan kelima peran BPP Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh.

Sehingga saat ini ada atau tidak adanya Kostratani tidak membawa pengaruh dan perubahan terhadap BPP Kecamatan Payakumbuh. Dari lima peran BPP Kostratani tiga diantaranya mampu dilakukan dengan baik karena merupakan kegiatan rutin dan melekat pada tugas pokok penyuluh yang sudah dilakukan sebelum adanya BPP Kostratani hanya menjadi lebih baik dengan pemanfaatan sarana dari program pendukung Kostratani

KESIMPULAN

Pengembangan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dan pelaksanaan fungsi dan peran BPP sebagai pusat data, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran sudah sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Sedangkan BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraan belum dilaksanakan sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Dalam pelaksanaan pengembangan Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sudah di dukung oleh kegiatan IPDMIP tapi belum memberikan hasil yang baik. BPP Kecamatan Payakumbuh baru mampu melaksanakan empat dari enam indikator BPP Kostratani pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya komitmen dari implementor di tingkat Kostrawil, Kostrada dan Kostratani di kecamatan. Pelaksanaan Kostratani belum di dukung kemampuan sumberdaya berupa sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki oleh BPP

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah administrasi Publik*, 2(3), 49-58.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021. Rencana Kerja Tahunan BPPSPDMP TA 2022

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023. Tayangan MSPP VOL.02 Januari 2023. Program BPPSPDMP 2023

Ekowati, M. R. L., & Roro, M. (2019). Perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program. *Surakarta: Pustaka Cakra*.

Izmi, D. S., Yulaicho, M. R., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 702-710.

Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050/1/11/2020 Tentang Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur Balai Penyuluhan Pertanian Komando Strategis Pembangunan Pertanian Di Kecamatan. Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyani, S. 2020. Sinergitas Pembangunan Pertanian di Kostratani. <http://cybex.pertanian.go.id>, diakses tanggal 11/9/2022jam 12:58

Mulyani, S. 2020. Pengembangan Model BPP Kostratani. <http://cybex.pertanian.go.id>, diakses tanggal 11/9/2022jam 12:58

Pakpahan, T. E., Wicaksono, M., & Hrp, Q. H. (2021). peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 46-67.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis

- Pembangunan Pertanian. Jakarta. Permentan.
- Subarsono, A. G. (2022). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D). Bandung: Alfabeta.
- Syahyuti. 2021. Tayangan Penyuluhan Pertanian Baru. Workshop Arah Baru Pembangunan Pertanian: Manajemen Inovasi dan Kewirausahaan Sosial. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Taib, G dan Roswita, R. 2019. Ilmu Sosial Dalam Perspektif Industri Pertanian. Uwais Inspirasi Indonesia